



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**

RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi OPD kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implemementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran OPD. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyusunan rencana kerja ini.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 ini

Sumenep, 11 Juni 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	22
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	26
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	40
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2019.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.....	12
Tabel 2.3	Review RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sumenep	18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	23
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	33
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021	42

BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) pelaksanaan pelayanan perangkat Daerah;

- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 2.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V : PENUTUP

BAB II



HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2020 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2020																																													
										Target Renja OPD tahun 2019	Realisasi Renja OPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9=8/7					10					11=6+10					12=(11/5)				
4					Pemerintahan/Pelayanan Publik																																																						
4	05				Urusan Kepegawaian																																																						
4	05	01			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																																																						
4	05	01	01		Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100,00 %																																											
4	05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	24.000	12.000	12.000	12.000	100%	12.000	24.000	100,00 %																																												
4	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	12	12	12	100%	12	24	100,00 %																																												
4	05	01	01	03	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor		Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	66	33	33	33	100%	33	66	100,00 %																																												
4	05	01	01	04	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran		Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 Tahun Anggaran	100	50	50	50	100%	50	100	100,00 %																																												
4	05	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen listrik yang diadakan	20	10	10	10	100%	10	20	100,00 %																																												
4	05	01	01	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	12	12	12	100%	12	24	100,00 %																																												
4	05	01	01	07	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah tersedianya makanan dan minuman	150	75	75	75	100%	75	150	100,00 %																																												

4	05	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	518	259	259	259	100%	259	518	100,00 %
4	05	01	01	09	Peringatan Hari-Hari Besar	Pameran Pembagunan dan HUT KORPRI	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	4	2	2	2	100%	2	4	100,00 %
4	05	01	01	11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran		jumlah layanan perkantoran yang disediakan	122	61	61	61	100%	61	122	100,00 %
4	05	01	01	17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	2	2	2	100%	2	4	100,00 %
4	05	01	01	18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26	13	13	13	100%	13	26	100,00 %
4	05	01	01	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	20	10	10	10	100%	10	20	100,00 %
4	05	01	03		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	200%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100,00 %
4	05	01	03	01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan yang disusun	4	2	2	2	100%	2	4	100,00 %
4	05	01	03	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	14	7	7	7	100%	7	14	100,00 %
4	05	01	15		Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian		Persentase Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian	165%	98,00%	80,00%	97,68%	122%	85,00%	183%	110,91 %
4	05	01	15	01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Validasi Data Kepegawaian	Jumlah OPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKPSDM	114	57	57	57	100%	57	114	100,00 %
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAGA)	Jumlah Sistem Absensi Pegawai	122	61	61	61	100%	61	122	100,00 %
						Penyusunan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik	Jumlah Tata Naskah Perorangan Pegawai	9.213	8.999	9.213	8.999	97,68%	0	8.999	97,68%

4	05	01	15	02	Pengembangan Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001	Jumlah Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001-2008	2	1	1	1	100%	1	2	100,00 %
						Penyediaan Data Informasi Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan Buku Peraturan	305	122	122	122	100%	183	305	100,00 %
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	Jumlah Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	322	161	161	161	100%	161	322	100,00 %
4	05	01	16		Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN		Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	90%	0	90%	0%		0	0,00%	
4	05	01	16	01	Penataan ASN	Proses Peninjauan Masa Kerja	Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja PNS	20	18	10	18	180%	10	28	140,00 %
						Pelaksanaan Sumpah Dan Janji PNS	Jumlah PNS yang disumpah	300	0	0	0	0%	300	300	100,00 %
						Tim Penilai Kinerja PNS	Jumlah Tim Penilai Kinerja PNS	12	6	6	6	100%	6	12	100,00 %
						Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik	5.000	1.291	2.500	1.291	52%	2.500	3.791	75,82%
						Penyerahan SK. Pensiun PNS secara Simbolis	Jumlah Penerimaan SK Pensiun PNS Simbolis	300	150	150	150	100%	150	300	100,00 %
						Proses Administrasi Pensiun ASN	Jumlah Administrasi ASN yang pensiun	400	482	200	482	241%	200	682	170,50 %
						Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah SK. Pengangkatan CPNS menjadi PNS	300	0	0	0	0%	300	300	100,00 %
4	05	01	16	02	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu	5.200	1.413	2.600	1.413	54%	2.600	4.013	77,17%
4	05	01	16	03	Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur	Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Jumlah Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama	130	58	65	58	89%	65	123	94,62%
4	05	01	18		Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN		Prosentase Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN melalui aplikasi e-Formasi	150%	81,99%	75,00%	81,99%	109%	75%	157%	104,66 %

4	05	01	18	02	Seleksi penerimaan calon ASN	Proses Pemberkasan dan Penempatan CPNSD	Jumlah Berkas Penempatan CPNSD	682	305	307	305	99,35%	310	615	90,18%
						Rekrutmen PPPK Daerah, Pengarahan, Pemberkasan dan Penyerahan SK PPPK TA.2019 Tahap I dan Tahap II	Jumlah peserta berdasarkan Pendaftar	3.973	3.973	3.973	3.973	100,00%	-	3.973	100,00 %
						Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah , Pengarahan, Pemberkasan dan Penyerahan SK CPNS TA 2019	Jumlah Penerimaan Calon ASN	7.000	7.919	7.000	7.919	113,13%	-	7.919	113,13 %
4	05	01	19		Program Peningkatan Disiplin ASN		Persentase Nilai SKP yang baik	80%	0	80%		0%		0	0,00%
4	05	01	19	01	Pembinaan Aparatur	Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin terselesaikan	30	23	30	23	130%	30	23	130,43 %
						Proses Pelaporan LHKPN	Jumlah pelapor LHKPN	68	34	34	34	100%	34	68	100,00 %
						Proses Pengisian dan Penyampaian LP2P	Jumlah PNS Wajib Pajak	8.000	4.064	4.000	4.064	102%	4.000	8.064	100,80 %
4	05	01	19	02	Penilaian Kinerja Aparatur	Sosialisasi Sistem E-Kinerja	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Berbasis E-Kinerja	232	54	54	54	100%	178	232	100,00 %
4	05	01	19	03	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Pengadministrasian Penyerahan Tambahan Penghasilan Pegawai	Jumlah Penerima TPP	6.000	2.988	3.000	2.988	99,60%	3.000	5.988	99,80%
						Pemberian insentif bagi Tenaga Honorar (eks. K2)	Jumlah Tenaga Honorar (eks K2)	630	315	315	315	100%	315	630	100,00 %

					Penataan Administrasi dan Monitoring Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pemberian Gaji/upah bagi PTT	30	15	15	15	100%	15	30	100,00 %	
					Proses Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	Jumlah Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	700	495	350	495	141%	350	845	120,71 %	
					Proses Usul dan Penetapan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Jumlah Penerima Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA	200	92	100	92	92%	100	192	96,00%	
4	06				Urusan : Pendidikan dan Pelatihan										
4	06	01	15		Program Pengembangan Kompetensi SDM	Persentase Peserta Lulus Diklat	180,00%	93,05%	90,00%	93,05%	103,39%	90,00%	183%	101,69 %	
4	06	01	15	01	Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	80	40	40	40	100,00%	40	80	100,00 %
4	06	01	15	02	Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	40	34	20	34	170,00%	20	54	135,00 %
4	06	01	15	03	Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Proses Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah Proses Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	500	112	250	112	44,80%	250	362	72,40%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peserta Lulus Diklat	100,00%	93,05%	100,00%	93,05%	93,05%	6,95%	100%	100,00 %	
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti LATSAR CPNS (Umum) dan K-2	314	274	314	274	87,26%	40	314	100,00 %

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2019, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 8 (delapan) program pada Renja Tahun 2019, yaitu meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian;
4. Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN;
5. Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN;
6. Program Peningkatan disiplin ASN;
7. Program Pengembangan Kompetensi SDM;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				(Tahun n-2) 2017	(Tahun n-1) 2018	(Tahun n) 2019	(Tahun n+1) 2020	(Tahun n+2) 2021	(Tahun n-2) 2017	(Tahun n-1) 2018	(Tahun n) 2019	(Tahun n) 2020	(Tahun n+1) 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	-	-	78%	80%	83%	86%	87%	78,27%	81,53%	81,53%	83%	86%	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	P-1
	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	-	-	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	14.885	15.012	10.500	12.000	12.000	
	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	-	-	952	952	33	33	33	952	952	50	33	33	
	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	-	-	16.936	16.936	50	50	50	15.935	15.935	50	50	50	
	Jumlah komponen listrik yang diadakan	-	-	609	609	10	10	10	609	609	10	10	10	
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	194	194	12	12	12	174	174	12	12	12	
	jumlah tersedianya makanan dan minuman	-	-	1.320	1.320	85	85	85	1.280	1.280	95	85	85	
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	259	259	259	259	259	193	193	115	259	259	

	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	-	-	161	161	61	61	61	161	161	61	61	61	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	-	-	254	254	3	3	3	254	254	10	3	3	
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	17	17	13	13	13	11	11	11	13	13	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	-	1	1	10	10	10	1	1	1	10	10	
2	Persentase Pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	-	-	-	68	1	1	1	-	68	1	1	1	
3	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	11	11	7	7	7	7	11	7	7	7	

	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	-	5	5	2	2	2	2	5	2	2	2	
4	Persentase Akurasi Updating data kepegawaian	-	-	80%	80%	80%	85%	85%	99%	99%	99%	80%	85%	P-1
	Jumlah kelompok data yang diupdate	-	-	9.711	9.269	8.821	8.625	8.411	9.655	9.141	9.141	8.821	8.625	
	Jumlah penyampaian informasi kepegawaian	-	-	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	
5	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	-	-	85%	85%	90%	90%	95%	85%	91%	94%	90%	90%	P-1
	Jumlah Jabatan Terisi Sesuai Kompetensi	-	-	1.071	886	922	922	922	1.170	805	849	922	922	
	Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep			89	91	93	94	95	89	97	97	93	94	
	Jumlah Jabatan Terisi sesuai SOTK			1.121	910	925	925	925	1.058	886	905	922	922	
	Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS			85%	85%	90%	90%	95%	53.08%	51%	60%	90%	90%	
	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.380	1.317	1.500	2.600	2.600	
6	Jumlah ASN hasil seleksi yang sesuai dengan kebutuhan formasi	-	-	NA	50%	50%	50%	50%	NA	83%	50%	50%	50%	
	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN	-	-	NA	372	1	1	1	NA	372	682	1	1	

	Seleksi penerimaan calon ASN	-	-	NA	307	4.467	4.663	4.877	NA	307	305	4.467	4.663	
7	Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik	-	-	NA	NA	80%	80%	80%	NA	NA	NA	80%	80%	P-1
	Jumlah ASN dengan Nilai SKP yang Baik			NA	NA	9.213	8.625	8.411	NA	NA	NA	8.900	8.625	
	Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	76%	133%	133%	80%	80%	
	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin ASN			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,26	0,15	0,26	0,20	0,20	
8	Persentase ASN yang lulus diklat dalam Satu Tahun	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	97%	91%	91%	90%	90%	
	Jumlah Peserta Lulus Diklat Kompetensi SDM Manajerial	-	-	40	330	264	264	264	40	323	314	72	264	
	Jumlah Peserta Lulus Diklat Kompetensi SDM Teknis dan fungsional	-	-	925	165	165	165	165	925	121	34	20	165	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- 1) Penataan SDM aparatur yang belum terdistribusi sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi;
- 2) Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis *Merit System*;
- 3) Kompetensi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep belum dikembangkan secara optimal;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem layanan informasi manajemen kepegawaian;

Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Badan. Adapun tantangan di bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS)

- 1) Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan pelayanan manajemen aparatur sipil negara di daerah khususnya dibidang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan telah ditetapkan dalam peraturan.
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang sebelumnya telah menerapkan "Sistem Manajemen Mutu" bertaraf internasional ISO 9001 : 2018 di bidang pendidikan dan pelatihan, memungkinkan seluruh elemen organisasi

kembali bertekad mewujudkan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang berbasis sistem teknologi informasi.

- 3) Terjalannya koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Kemendagri, Setneg, BKN, PT. Taspen, Bapertarum) dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya.

Kelemahan (WEAKNESSES)

- 1) Belum Optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 2) Belum terbangunnya *merit system* yang mana penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum bisa diukur berdasarkan kompetensi.

Peluang (OPPORTUNITIES)

- 1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 2) Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima;
- 3) Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah yang professional dan berwawasan global.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	1.789.298.490	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	1.518.650.690	
	Penyediaan jasa surat menyurat				23.532.000	Penyediaan jasa surat menyurat				24.128.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				425.788.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				381.588.000	P-1
	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor				214.109.750	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor				214.109.750	
	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran				70.299.540	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran				70.299.540	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				47.022.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				47.022.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				32.250.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				32.250.000	
	Penyediaan makanan dan minuman				18.300.000	Penyediaan makanan dan minuman				18.300.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				198.088.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				132.469.200	
	Peringatan Hari-Hari Besar				47.455.000	Peringatan Hari-Hari Besar				47.455.000	
	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran				196.701.000	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran				196.701.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas				110.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas					

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas				159.750.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas				108.325.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				121.203.200	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				121.203.200	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas				124.800.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas				124.800.000	
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	20.332.000	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	20.332.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan				12.622.000	Penyusunan Laporan Keuangan				12.622.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.710.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.710.000	
3	Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian	80%	657.474.530	Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian	80%	657.474.530	
	Pengelolaan Data Kepegawaian				507.311.990	Pengelolaan Data Kepegawaian				507.311.990	P-1
	Pengembangan Informasi Kepegawaian				110.144.540	Pengembangan Informasi Kepegawaian				110.144.540	
	Proses Administrasi Pemberhentian ASN				40.018.000	Proses Administrasi Pemberhentian ASN				40.018.000	

4	Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penempatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	90%	1.660.959.500	Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penempatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	90%	1.325.346.500	
	Penataan ASN				494.850.000	Penataan ASN				636.697.500	
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS				207.448.500	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS				101.343.000	
	Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur				958.661.000	Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur				587.306.000	
5	Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN melalui aplikasi e-Formasi	50%	2.558.944.500	Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN melalui aplikasi e-Formasi	50%	18.123.500	
	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN				143.284.000	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN					
	Seleksi penerimaan calon ASN				2.415.660.500	Seleksi penerimaan calon ASN				18.123.500	
6	Program Peningkatan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Nilai SKP yang baik	80%	3.241.396.200	Program Peningkatan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Nilai SKP yang baik	80%	3.368.778.700	
	Pembinaan Aparatur				164.229.000	Pembinaan Aparatur				159.259.000	
	Penilaian Kinerja Aparatur				762.234.000	Penilaian Kinerja Aparatur				214.288.500	P-1
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				2.314.933.200	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				2.995.231.200	P-1
7	Program Pengembangan Kompetensi SDM	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Peserta Lulus Diklat	90%	4.336.142.500	Program Pengembangan Kompetensi SDM	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Peserta Lulus Diklat	90%	882.717.000	
	Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial				2.398.166.500	Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial				779.625.700	

	Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional				1.923.171.800	Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional				90.797.700	
	Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur				14.804.200	Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur				12.293.600	
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Peserta Lulus Diklat	90%	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Cakupan Peserta Lulus Diklat	90%	2.018.602.900	
	Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah				-	Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah				2.018.602.900	
JUMLAH TOTAL					14.264.547.720	JUMLAH TOTAL					7.791.422.920

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.4. sebagai berikut.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	7 Dokumen	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan akuntabel	100 Buku	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan	17 Jenis	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Kebutuhan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	75 Unit	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor dalam 1 Tahun	1 tahun	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	38 Jenis	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	17 Jenis	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	113 kali	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan	10 unit

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	13 Unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	2 Gedung	
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	BKPSDM			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKPSDM	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	BKPSDM	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	
			Pengadaan Pakaian Korpri	BKPSDM	Jumlah Pengadaan Pengadaan Pakaian Korpri	1 Paket	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	BKPSDM	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1 Paket	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen kebutuhan formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	2 dokumen	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Peserta berdasarkan Pendaftar dari Umum	7.000 orang	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah ASN yang diproses Pemberhentian dan Pensiun	350 ASN	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani	40 ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	3 Aplikasi	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	8.656 ASN	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	100 orang	
			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	Jumlah Peserta Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	20 orang	
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	8656 ASN	

			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	8656 ASN	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah Dokumen Surat Ijin Cuti ASN, Karis/Karsu ASN	650 Dokumen	
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah Penerima Satyalancana Karya Satya	150 orang	
			Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang melakukan pengisian dan pelaporan LP2P	4000 orang	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	30 Kasus	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Kasus Perceraian yang terselesaikan	30 dokumen	
			Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Wajib Laporkan LHKPN yang telah melaporkan LHKPN	39 orang	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Data Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi OPD	60 OPD	
		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti kegiatan manajemen talent	72 orang	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Pengawas, Administrator dan Kepemimpinan Nasional TK. II	12 orang	

BAB III



TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu agenda pembangunan (agenda pembangunan ke-7) yakni; Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan tujuan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Pencapaian agenda pembangunan tersebut di capai melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, dan
5. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Selain itu di dalam agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter diantaranya melalui Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup:

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan

2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian.

Indikator Tujuan/Target

Nilai SKM

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan;
 - b) Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi.
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Persentase ASN yang lulus diklat dalam satu tahun;
 - b) Persentase ASN dengan Nilai SKP yang baik;

- c) Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian, dengan indikator sasaran yaitu :
- a) Nilai SKM

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
 - 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya..

2. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - 1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - 1.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
 - 1.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 1.6 Pengelolaan Data Kepegawaian.
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN;
 - 2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - 2.3 Pengelolaan Promosi ASN.
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 3.2 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - 4.4 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
 - 4.5 Pembinaan Disiplin ASN;
 - 4.6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
 - 4.7 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
 - 4.8 Evaluasi Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan antara lain :
 - 2.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional;
 - 2.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
 - 2.3 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
	Kode		Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A	5	03				KEPEGAWAIAN								
i	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	BKPSDM	100%	9.880.403.042	APBD		100%	10.220.345.354
1	5	03	01	2.01		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Tepat Waktu	BKPSDM		6.318.900	APBD			12.953.745
	5	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM			APBD		1 Dokumen	6.318.900
	5	03	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	7 Dokumen	6.318.900	APBD		7 Dokumen	6.634.845
2	5	03	01	2.02		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan akuntabel	BKPSDM	1 Dokumen	7.941.478.660	APBD		1 Dokumen	8.338.552.593
	5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	66 orang	7.930.567.900	APBD		79 orang	8.327.096.295
	5	03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	100 Buku	10.910.760	APBD		100 Buku	11.456.298

4	5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	6 Sub Kegiatan	396.864.188	APBD		6 Sub Kegiatan	416.707.397
	5	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	17 Jenis	40.984.468	APBD		17 Jenis	43.033.691
	5	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	75 Unit	73.591.560	APBD		75 Unit	77.271.138
	5	03	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	1 tahun	124.179.160	APBD		1 tahun	130.388.118
	5	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	38 Jenis	30.225.000	APBD		38 Jenis	31.736.250
	5	03	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	17 Jenis	19.968.000	APBD		17 Jenis	20.966.400
	5	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	113 kali	107.916.000	APBD		113 kali	113.311.800
5	5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dibutuhkan	BKPSDM	82 Unit	612.738.760	APBD		10 unit	643.375.698
	5	03	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	82 Unit	612.738.760	APBD		10 unit	100.000.000
6	5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dibutuhkan	BKPSDM	82 Unit	628.731.094	APBD		82 Unit	660.167.649
	5	03	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	10.000 Surat	17.813.640	APBD		10.000 Surat	18.704.322

	5	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 2 Lokasi (BKPSDM dan SKD)	BKPSDM	12 Bulan	191.842.600	APBD		12 Bulan	201.434.730
	5	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang disediakan	BKPSDM	2 Jasa	419.074.854	APBD		2 Jasa	440.028.597
7	5	03	01	2.09			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	BKPSDM	15 Unit	294.271.440	APBD		15 Unit	148.588.272
	5	03	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	BKPSDM	13 Unit	141.512.640	APBD		13 Unit	148.588.272
	5	03	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	BKPSDM	2 Gedung	152.758.800	APBD		2 Gedung	160.396.740
I I .	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi/analisis jabatan	BKPSDM	95%	2.016.206.928	APBD		95%	2.117.017.274
1 .	5	03	02	2.01			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kebutuhan dan Formasi	BKPSDM	8.656 orang	1.042.271.130	APBD		8.656 orang	1.094.384.687
	5	03	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	BKPSDM	2 dok	48.400.360	APBD		2 dok	50.820.378

	5	03	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta berdasarkan Pendaftar dari Umum	BKPSDM	5.000 orang	670.467.720	APBD		5.000 orang	703.991.106
	5	03	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diproses Pemberhentian dan Pensiun	BKPSDM	350 ASN	98.828.390	APBD		350 ASN	103.769.810
	5	03	02	2.01	08		Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani	BKPSDM	40 ASN	47.996.660	APBD		40 ASN	50.396.493
	5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	BKPSDM	3 Aplikasi	89.943.500	APBD		3 Aplikasi	94.440.675
	5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	BKPSDM	8656 ASN	86.634.500	APBD		8656 ASN	90.966.225
2	5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	4.640 orang	472.255.930	APBD		4.640 orang	495.868.727
	5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	BKPSDM	2.000 orang	158.461.290	APBD		2.000 orang	166.384.355
	5	03	02	2.02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	BKPSDM	2.600 PNS	72.979.380	APBD		2.600 PNS	76.628.349
	5	03	02	2.02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi	BKPSDM	40 orang	240.815.260	APBD		40 orang	252.856.023
3	5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Peserta Lulus Diklat	BKPSDM	90%	194.128.090	APBD		90%	203.834.495
	5	03	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	BKPSDM	100 orang	38.469.810	APBD		100 orang	40.393.301

	5	03	02	2.03	05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	BKPSDM	20 orang	155.658.280	APBD		20 orang	163.441.194
4	5	03	02	2.04			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dengan Nilai SKP Baik	BKPSDM	8.656 orang	307.551.778	APBD		8.656 orang	322.929.367
	5	03	02	2.04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	8656 ASN	41.353.304	APBD		8656 ASN	43.420.969
	5	03	02	2.04	03		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	8656 ASN	63.825.200	APBD		8656 ASN	67.016.460
	5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Surat Ijin Cuti ASN, Karis/Karsu ASN	BKPSDM	650 Dokumen	29.630.672	APBD		650 Dokumen	31.112.206
	5	03	02	2.04	05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Penerima Satyalancana Karya Satya	BKPSDM	150 orang	57.755.878	APBD		150 orang	60.643.672
	5	03	02	2.04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang melakukan pengisian dan pelaporan LP2P	BKPSDM	4000 orang	12.415.590	APBD		4000 orang	13.036.370
	5	03	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	30 Kasus	71.681.478	APBD		30 Kasus	75.265.552
	5	03	02	2.04	09		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Kasus Perceraian yang terselesaikan	BKPSDM	30 dokumen	22.941.012	APBD		30 dokumen	24.088.063
	5	03	02	2.04	10		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Wajib Lapo LHKPN yang telah melaporkan LHKPN	BKPSDM	39 orang	7.948.644	APBD		39 orang	8.346.076
III	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kualitas SDM ASN	BKPSDM	90%	801.503.030	APBD		90%	841.578.182

1	5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Data Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPSDM	1 Dokumen	52.879.680	APBD		1 Dokumen	55.523.664
	5	04	02	2.01	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Data Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi OPD	BKPSDM	60 OPD	52.879.680	APBD		60 OPD	55.523.664
2	5	04	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Data Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	1 Dokumen	748.623.350	APBD		1 Dokumen	786.054.518
	5	04	02	2.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti kegiatan manajemen talent	BKPSDM	72 orang	343.460.220	APBD		72 orang	360.633.231

	5	04	02	2.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Pengawas, Administrator dan Kepemimpinan Nasional TK. II	BKPSDM	12 orang	360.381.650	APBD		12 orang	378.400.733
	5	04	02	2.02	08		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terinventarisasinya data pengembangan kompetensi ASN di tiap OPD	BKPSDM	1 dokumen	44.781.480	APBD		1 dokumen	47.020.554

BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pgu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah,

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
3. Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
4. Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan dan kesejahteraan pegawai;
5. Penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021

No	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
	Kode		Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A	5	03				KEPEGAWAIAN								
i	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	BKPSDM	100%	9.880.403.042	APBD		100%	10.220.345.354
1	5	03	01	2.01		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Tepat Waktu	BKPSDM		6.318.900	APBD			12.953.745
	5	03	01	2.01	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	BKPSDM			APBD		1 Dokumen	6.318.900
	5	03	01	2.01	06		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	BKPSDM	7 Dokumen	6.318.900	APBD		7 Dokumen	6.634.845
2	5	03	01	2.02		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan akuntabel	BKPSDM	1 Dokumen	7.941.478.660	APBD		1 Dokumen	8.338.552.593
	5	03	01	2.02	01		Jumlah ASN yang mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan	BKPSDM	66 orang	7.930.567.900	APBD		79 orang	8.327.096.295

	5	03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan akuntabel	BKPSDM	100 Buku	10.910.760	APBD		100 Buku	11.456.298
4	5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	6 Sub Kegiatan	396.864.188	APBD		6 Sub Kegiatan	416.707.397
	5	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan	BKPSDM	17 Jenis	40.984.468	APBD		17 Jenis	43.033.691
	5	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	75 Unit	73.591.560	APBD		75 Unit	77.271.138
	5	03	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor dalam 1 Tahun	BKPSDM	1 tahun	124.179.160	APBD		1 tahun	130.388.118
	5	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BKPSDM	38 Jenis	30.225.000	APBD		38 Jenis	31.736.250
	5	03	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	17 Jenis	19.968.000	APBD		17 Jenis	20.966.400
	5	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BKPSDM	113 kali	107.916.000	APBD		113 kali	113.311.800
5	5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dibutuhkan	BKPSDM	82 Unit	612.738.760	APBD		10 unit	643.375.698
	5	03	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	BKPSDM	82 Unit	612.738.760	APBD		10 unit	100.000.000
6	5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dibutuhkan	BKPSDM	82 Unit	628.731.094	APBD		82 Unit	660.167.649

	5	03	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diadministrasikan	BKPSDM	10.000 Surat	17.813.640	APBD		10.000 Surat	18.704.322
	5	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 2 Lokasi (BKPSDM dan SKD)	BKPSDM	12 Bulan	191.842.600	APBD		12 Bulan	201.434.730
	5	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang disediakan	BKPSDM	2 Jasa	419.074.854	APBD		2 Jasa	440.028.597
7	5	03	01	2.09			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	BKPSDM	15 Unit	294.271.440	APBD		15 Unit	148.588.272
	5	03	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	BKPSDM	13 Unit	141.512.640	APBD		13 Unit	148.588.272
	5	03	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	BKPSDM	2 Gedung	152.758.800	APBD		2 Gedung	160.396.740
1	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi/analisis jabatan	BKPSDM	95%	2.016.206.928	APBD		95%	2.117.017.274
1	5	03	02	2.01			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kebutuhan dan Formasi	BKPSDM	8.656 orang	1.042.271.130	APBD		8.656 orang	1.094.384.687

	5	03	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	BKPSDM	2 dok	48.400.360	APBD		2 dok	50.820.378
	5	03	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta berdasarkan Pendaftar dari Umum	BKPSDM	5.000 orang	670.467.720	APBD		5.000 orang	703.991.106
	5	03	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diproses Pemberhentian dan Pensiun	BKPSDM	350 ASN	98.828.390	APBD		350 ASN	103.769.810
	5	03	02	2.01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani	BKPSDM	40 ASN	47.996.660	APBD		40 ASN	50.396.493
	5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	BKPSDM	3 Aplikasi	89.943.500	APBD		3 Aplikasi	94.440.675
	5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	BKPSDM	8656 ASN	86.634.500	APBD		8656 ASN	90.966.225
2	5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	4.640 orang	472.255.930	APBD		4.640 orang	495.868.727
	5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	BKPSDM	2.000 orang	158.461.290	APBD		2.000 orang	166.384.355
	5	03	02	2.02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	BKPSDM	2.600 PNS	72.979.380	APBD		2.600 PNS	76.628.349
	5	03	02	2.02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi	BKPSDM	40 orang	240.815.260	APBD		40 orang	252.856.023
3	5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Peserta Lulus Diklat	BKPSDM	90%	194.128.090	APBD		90%	203.834.495

	5	03	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	BKPSDM	100 orang	38.469.810	APBD		100 orang	40.393.301
	5	03	02	2.03	05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	BKPSDM	20 orang	155.658.280	APBD		20 orang	163.441.194
4	5	03	02	2.04			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dengan Nilai SKP Baik	BKPSDM	8.656 orang	307.551.778	APBD		8.656 orang	322.929.367
	5	03	02	2.04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	8656 ASN	41.353.304	APBD		8656 ASN	43.420.969
	5	03	02	2.04	03		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	8656 ASN	63.825.200	APBD		8656 ASN	67.016.460
	5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Surat Ijin Cuti ASN, Karis/Karsu ASN	BKPSDM	650 Dokumen	29.630.672	APBD		650 Dokumen	31.112.206
	5	03	02	2.04	05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Penerima Satyalancana Karya Satya	BKPSDM	150 orang	57.755.878	APBD		150 orang	60.643.672
	5	03	02	2.04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang melakukan pengisian dan pelaporan LP2P	BKPSDM	4000 orang	12.415.590	APBD		4000 orang	13.036.370
	5	03	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	30 Kasus	71.681.478	APBD		30 Kasus	75.265.552
	5	03	02	2.04	09		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Kasus Perceraian yang terselesaikan	BKPSDM	30 dokumen	22.941.012	APBD		30 dokumen	24.088.063
	5	03	02	2.04	10		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Wajib Lapo LHKPN yang telah melaporkan LHKPN	BKPSDM	39 orang	7.948.644	APBD		39 orang	8.346.076
III	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kualitas SDM ASN	BKPSDM	90%	801.503.030	APBD		90%	841.578.182

1	5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Data Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPSDM	1 Dokumen	52.879.680	APBD		1 Dokumen	55.523.664
	5	04	02	2.01	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Data Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi OPD	BKPSDM	60 OPD	52.879.680	APBD		60 OPD	55.523.664
2	5	04	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Data Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	1 Dokumen	748.623.350	APBD		1 Dokumen	786.054.518
	5	04	02	2.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti kegiatan manajemen talent	BKPSDM	72 orang	343.460.220	APBD		72 orang	360.633.231

	5	04	02	2.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Pengawas, Administrator dan Kepemimpinan Nasional TK. II	BKPSDM	12 orang	360.381.650	APBD		12 orang	378.400.733
	5	04	02	2.02	08		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terinventarisasinya data pengembangan kompetensi ASN di tiap OPD	BKPSDM	1 dokumen	44.781.480	APBD		1 dokumen	47.020.554

BAB V



PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang diamanatkan dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dibutuhkan anggaran yang besar. Dengan anggaran saat ini, penyelenggaraan kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep di bidang kelembagaan cukup terbatas.

1.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan Tahun 2021. Pencapaian target pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh

aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumenep, 11 Juni 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 198809 1 001